



COMPLIANCE

KEPATUHAN

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM), bersama anak usaha yang bergerak di bidang energi berkomitmen menciptakan nilai maksimal bagi pelanggan dan berupaya mencapai keunggulan melalui penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan dan manajemen sistem terkait yang akurat, valid serta sesuai dengan persyaratan pelanggan, standar ISO serta perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Kepatuhan ini menjadi acuan penetapan kerangka kerja yang memastikan kegiatan bisnis dilakukan dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang sesuai dengan persyaratan pelanggan, standar ISO serta perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh karyawan, kontraktor, anak Perusahaan, dan mitra kerja, termasuk pemasok dalam rantai pasok di semua tingkat Perusahaan. Setiap pihak bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku, serta menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini telah tertanam dalam budaya dan setiap aspek organisasi yang mencerminkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

Visi ITM:

Menjadi Perusahaan Indonesia di bidang energi yang berintikan inovasi, teknologi, inklusi dan keberlanjutan.

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM), together with its subsidiaries engaged in the energy sector, is committed to creating maximum value for customers and strives to achieve excellence through the implementation of Compliance Management Systems and related management systems that are accurate, valid and in accordance with customer requirements, ISO standards and applicable laws.

The Compliance Policy serves as a reference for establishing a framework that ensures business activities are carried out with integrity, transparency, and accountability in accordance with customer requirements, ISO standards and applicable laws.

The Policy applies to all employees, contractors, subsidiaries, and business partners, including suppliers throughout the entire supply chains of the Company. Each party is responsible for understanding and complying with all applicable laws and regulations and conducting business ethically and responsibly. These principles have been embedded in the culture and every aspect of the organization that reflects the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Vision:

Becoming an Indonesian energy Company at the heart of innovation, technology, inclusion, and sustainability.

Misi ITM:

1. Menjadi bagian dari pengembangan energi bangsa.
2. Menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemangku kepentingan melalui pengembangan portofolio usaha yang sejalan dengan kebutuhan energi masa depan.
3. Mengembangkan nilai-nilai Perusahaan dan kemampuan organisasi guna mendorong transformasi usaha dan penciptaan keunggulan kompetitif.
4. Menjadi Perusahaan terpercaya dan terkemuka yang menerapkan cara-cara berkelanjutan dalam mengelola aspek lingkungan, sosial dan tata kelola.

Nilai inti Perusahaan yaitu Banpu Heart yang terdiri dari *Passionate, Innovative, Committed*, merupakan dasar dan komitmen untuk menciptakan dan menerapkan norma-norma Kepatuhan yang kuat. Norma-norma ini menjadi landasan kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yang memastikan bahwa kegiatan bisnis Perusahaan dilakukan secara etis, transparan, dan sesuai dengan seluruh hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan prinsip-prinsip GCG yang diadopsi, Perusahaan berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip:

1. **Akuntabilitas:** Bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat.
2. **Transparansi:** Mengungkapkan informasi secara terbuka dan jujur untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan.
3. **Keadilan:** Memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan menghindari konflik kepentingan.
4. **Tanggung jawab:** Bertindak dengan integritas dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut.

Untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut, Perusahaan melakukan integrasi teknologi melalui:

1. Pemanfaatan teknologi dalam memantau dan memastikan Kepatuhan, termasuk penggunaan sistem otomatis untuk pelaporan, analisis data risiko Kepatuhan, dan melakukan monitoring-evaluasi Kepatuhan secara real-time agar dapat mengidentifikasi potensi risiko Kepatuhan secara dini dan meningkatkan respons mitigasi.
2. Penggunaan teknologi dan digitalisasi pendukung lainnya yang bertujuan untuk memastikan independensi dan menghindari konflik kepentingan dalam proses pemantauan dan pelaporan Kepatuhan.

Mission:

1. *To become part of the nation's energy development.*
2. *To create sustainable value for all stakeholders by developing synergy in the business portfolio aligned with future energy needs.*
3. *To foster corporate values and organizational capabilities to drive business transformation and competitive advantages creation.*
4. *To be a trusted and leading Company that practices sustainable ways in managing environmental, social, and governance (ESG) aspects.*

The Company's core values, Banpu Heart, consisting of Passionate, Innovative, Committed, are the basis and commitment to creating and implementing strong Compliance norms. These norms are the foundation of the Good Corporate Governance (GCG) framework, which ensures that the Company's business activities are carried out ethically, transparently, and in accordance with all applicable laws and regulations.

With the adopted GCG principles, the Company strives to implement the principles of:

1. **Accountability:** *Responsible to stakeholders, including shareholders, employees, customers, and the community.*
2. **Transparency:** *Disclosing information openly and honestly to enhance trust and confidence.*
3. **Fairness:** *Treating all stakeholders equitably and avoiding conflicts of interest.*
4. **Responsibility:** *Acting with integrity and considering the long-term consequences of actions.*

To implement these GCG principles, the Company integrates technology through:

1. *Utilization of technology in monitoring and ensuring Compliance, including the use of automated systems for reporting, analyzing Compliance risk data, and conducting real-time Compliance monitoring and evaluation to identify potential Compliance risks early and improve mitigation responses.*
2. *Use of technology and other supporting digitalization aimed at ensuring independence and avoiding conflicts of interest in the Compliance monitoring and reporting processes.*

Untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut, Perusahaan melakukan integrasi teknologi melalui:

1. Pemanfaatan teknologi dalam memantau dan memastikan Kepatuhan, termasuk penggunaan sistem otomatis untuk pelaporan, analisis data risiko Kepatuhan, dan melakukan monitoring-evaluasi Kepatuhan secara real-time agar dapat mengidentifikasi potensi risiko Kepatuhan secara dini dan meningkatkan respons mitigasi.
2. Penggunaan teknologi dan digitalisasi pendukung lainnya yang bertujuan untuk memastikan independensi dan menghindari konflik kepentingan dalam proses pemantauan dan pelaporan Kepatuhan.

ITM memiliki komitmen yang kuat terhadap:

1. Penerapan dan pemenuhan kewajiban terhadap prinsip Kepatuhan (persyaratan dan komitmen yang berlaku),
2. Proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen Kepatuhan.

Guna memastikan independensinya, Kepatuhan harus terpisah dari operasi bisnis. Independensi ini dijamin oleh prinsip-prinsip berikut:

1. Status Formal: Kepatuhan harus memiliki status formal dalam Perusahaan serta melapor langsung kepada Direksi. Hal ini memastikan bahwa Kepatuhan memiliki wewenang dan sumber daya untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.
2. Pelaporan yang Komprehensif: Kepatuhan harus memberikan laporan rutin dan terperinci kepada manajemen puncak, termasuk Direksi dan Komisaris. Laporan-laporan ini harus mencakup ruang lingkup dan efektivitas kegiatan Kepatuhan, temuan-temuan utama, serta rekomendasi untuk perbaikan.
3. Penghindaran Benturan Kepentingan: Kepatuhan tidak boleh ditempatkan pada posisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara tanggung jawabnya dengan peran atau tanggung jawab lain dalam organisasi. Hal ini termasuk menghindari situasi di mana petugas Kepatuhan memiliki kepentingan keuangan di Perusahaan atau anak Perusahaan.

To implement these GCG principles, the Company integrates technology through:

1. *Utilization of technology in monitoring and ensuring Compliance, including the use of automated systems for reporting, analyzing Compliance risk data, and conducting real-time Compliance monitoring and evaluation to identify potential Compliance risks early and improve mitigation responses.*
2. *Use of technology and other supporting digitalization aimed at ensuring independence and avoiding conflicts of interest in the Compliance monitoring and reporting processes.*

ITM has a strong commitment to:

1. *Implementation and fulfillment of obligations to the principles of Compliance (applicable requirements and commitments).*
2. *Continuous evaluation and improvement process of the Compliance management system.*

To ensure its independency, Compliance must be separate from the business operations. This independence is ensured by the following principles:

1. *Formal Status: Compliance must have formal status within the Company and report directly to the Board of Directors. This ensures that Compliance has the authority and resources to carry out its responsibilities effectively.*
2. *Comprehensive Reporting: Compliance must provide regular and detailed reports to top management, including the Board of Directors and Commissioners. These reports should include the scope and effectiveness of Compliance activities, key findings, and recommendations for improvement.*
3. *Avoidance of Conflicts of Interest: Compliance must not be placed in a position where its responsibilities conflict with other roles or responsibilities within the organization. This includes avoiding situations where the Compliance Officer has a financial interest in the Company or its subsidiaries.*

4. Akses Tak Terbatas: Fungsi Kepatuhan harus memiliki akses tak terbatas ke semua informasi dan personel yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini termasuk akses ke catatan keuangan, data operasional, dan catatan karyawan. Namun, akses tersebut harus dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi (PDP), termasuk memastikan keamanan data, membatasi akses hanya untuk tujuan yang relevan, dan menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. *Unrestricted Access: The Compliance function must have unrestricted access to all information and personnel necessary to carry out its responsibilities. This includes access to financial records, operational data, and employee records. However, such access must be carried out while still complying with the principles of Personal Data Protection (PDP), including ensuring data security, limiting access only to relevant purposes, and maintaining the confidentiality of information in accordance with applicable legal requirements.*

Kebijakan berikut ini ditetapkan untuk ITM Group dengan mengacu pada:

The following policies are established for ITM Group with reference to:

1. Organisasi berkomitmen untuk memastikan Kepatuhan terhadap semua hukum, peraturan eksternal, standar industri, serta kebijakan dan prosedur internal yang relevan. Setiap individu dalam Perusahaan didukung melalui pelatihan dan sumber daya agar dapat memahami dan memenuhi kewajiban Kepatuhan.
2. Organisasi secara proaktif mengelola risiko Kepatuhan dengan melakukan penilaian risiko secara berkala, menerapkan kontrol yang efektif, dan memantau perubahan lingkungan peraturan. Hal ini bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan dan meminimalkan dampaknya.
3. Dalam pengelolaan risiko Kepatuhan, perlu adanya pendekatan yang efektif dan sistematis. Oleh karena itu, Perusahaan akan melakukan:
 - a. Mengidentifikasi potensi risiko Kepatuhan melalui penilaian dan pemantauan rutin.
 - b. Menilai kemungkinan dan dampak dari risiko-risiko tersebut.
 - c. Mengembangkan dan menerapkan strategi mitigasi yang tepat.
 - d. Memantau efektivitas strategi ini dan menyesuaikan sesuai kebutuhan.
4. Perusahaan berkomitmen pada sistem manajemen Kepatuhan yang terus diperbarui agar selaras dengan tujuan bisnis. Langkah ini mencakup peninjauan kebijakan secara rutin, pelatihan karyawan, dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mendukung inisiatif Kepatuhan.

1. *The organization is committed to ensuring Compliance with all relevant laws, external regulations, industry standards, and internal policies and procedures. Everyone in the Company is supported through training and resources to understand and fulfill Compliance obligations.*
2. *The organization proactively manages the Compliance risk by conducting regular risk assessments, implementing effective controls, and monitoring changes in the regulatory environment. This aims to prevent non-Compliance and minimize its impact.*
3. *In Compliance risk management, an effective and systematic approach is required, for which the Company will:*
 - a. *Identify potential Compliance risks through regular assessments and monitoring.*
 - b. *Assess the likelihood and impact of these risks.*
 - c. *Develop and implement appropriate mitigation strategies.*
 - d. *Monitor the effectiveness of these strategies and adjust as needed.*
4. *The Company committed to a Compliance management system that is continually updated to align with business objectives. This includes regularly reviewing policies, training employees, and allocating the necessary resources to support Compliance initiatives.*

Peran manajemen dan karyawan dalam kebijakan ini adalah:

1. Seluruh karyawan diharapkan memahami serta mematuhi semua hukum, peraturan, dan kebijakan Perusahaan yang berlaku.
2. Membangun dan memelihara budaya Kepatuhan yang kuat dengan menekankan perilaku etis serta Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Manajemen memastikan bahwa seluruh karyawan memahami kebijakan ini, menjadikannya sebagai pedoman, serta mengkomunikasikannya ke semua tingkatan dan kegiatan Perusahaan.
3. Memastikan Perusahaan di setiap tingkatan menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk pendanaan, kompetensi SDM, dan infrastruktur.

Setiap karyawan menyadari peran mereka dalam menegakkan standar Kepatuhan. Setiap karyawan,

pada gilirannya, harus memahami dan bertanggung jawab untuk mematuhi pedoman ini serta melaporkan setiap potensi masalah Kepatuhan.

Untuk mencapai hal-hal tersebut, ITM menetapkan program Kepatuhan dengan tujuan untuk meningkatkan Kepatuhan dan keberlanjutan budaya Kepatuhan di Perusahaan.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh fungsi Perusahaan yang ada di Perusahaan, termasuk anak Perusahaan serta seluruh mitra kerja, seperti kontraktor dan pemasok, dalam seluruh rantai pasok. Perusahaan akan memantau dan meninjau kebijakan ini secara berkala serta melakukan penyesuaian jika diperlukan sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan, kondisi operasional, dan kebutuhan bisnis Perusahaan.

The role of management and employees within the Policy are:

1. All employees are expected to understand and comply with all applicable laws, regulations and Company policies.
2. Building and maintaining a strong Compliance culture by emphasizing ethical behavior and comply with laws and regulations. Management ensures that all employees understand this policy, make it a guideline, and communicate it to all levels and activities of the Company.
3. Ensuring that the Company provides adequate resources, including funding, HR competency, and infrastructure at every level.

Every employee understands their role in enforcing Compliance standards. Every employee, in turn, must

understand and be responsible for complying with these guidelines and reporting any potential Compliance issues.

To achieve these goals, ITM has established a Compliance program with the aim of improving the Compliance and the sustainability of the Compliance culture in the Company.

This policy applies to all functions in the Company, including subsidiaries and partners, such as contractors and suppliers, throughout the supply chain. The Company will monitor and review this policy periodically and adjust, if necessary, as a form of commitment to laws and regulations, operational conditions, and the Company's business needs.

Jakarta, 22 Juli | 22 July, 2025



Mulianto

Direktur Utama | President Director